



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420/100 TAHUN 2018
TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI
INFORMASI KOMPUTER PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan Dasar yang telah di alokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan peningkatan kualitas layanan pembelajaran melalui dukungan pembiayaan pengadaan peralatan teknologi informasi komputer bagi sekolah dasar, maka perlu menetapkan penerima bantuan pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer Pembelajaran Sekolah Dasar dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer Pembelajaran Sekolah Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

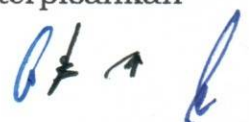
[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer Pembelajaran Sekolah Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Sekolah Dasar Penerima Bantuan Keuangan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria Sekolah Dasar Negeri yang sudah terakreditasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

G. T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Sekolah penerima bantuan keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/100 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN KEUANGAN ALAT TEKNOLOGI
 INFORMASI KOMPUTER PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN ALAT TEKNOLOGI INFORMASI
 KOMPUTER PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PAKET	DANA SATUAN (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	SDN 1 Talagening	Bobotsari	1 paket	30,000,000	30,000,000
2	SDN 2 Bumisari	Bojongsari	1 paket	30,000,000	30,000,000
3	SDN 3 Karanggedang	Bukateja	1 paket	30,000,000	30,000,000
4	SDN 2 Selanegara	Kaligondang	1 paket	30,000,000	30,000,000
5	SDN 1 Manduraga	Kalimanah	1 paket	30,000,000	30,000,000
6	SDN 1 Sidakangen	Kalimanah	1 paket	30,000,000	30,000,000
7	SDN 2 Kertanegara	Kertanegara	1 paket	30,000,000	30,000,000
8	SDN 1 Jambudesa	Karanganyar	1 paket	30,000,000	30,000,000
9	SDN 1 Sirandu	Karangjambu	1 paket	30,000,000	30,000,000
10	SDN 2 Tajug	Karangmoncol	1 paket	30,000,000	30,000,000
11	SDN 1 Siwarak	Karangreja	1 paket	30,000,000	30,000,000
12	SDN 1 Pandansari	Kejobong	1 paket	30,000,000	30,000,000
13	SDN 3 Langgar	Kejobong	1 paket	30,000,000	30,000,000
14	SDN 2 Kalialang	Kemangkon	1 paket	30,000,000	30,000,000
15	SDN 1 Cendana	Kutasari	1 paket	30,000,000	30,000,000
16	SDN 2 Karangreja	Kutasari	1 paket	30,000,000	30,000,000
17	SDN 1 Sangkanayu	Mrebet	1 paket	30,000,000	30,000,000
18	SDN 1 Mangunegara	Mrebet	1 paket	30,000,000	30,000,000
19	SDN 2 Karangsentul	Padamara	1 paket	30,000,000	30,000,000
20	SDN 1 Bojanegara	Padamara	1 paket	30,000,000	30,000,000
21	SDN 3 Pengadegan	Pengadegan	1 paket	30,000,000	30,000,000
22	SDN 1 Tegalpingen	Pengadegan	1 paket	30,000,000	30,000,000
23	SDN 2 Bojong	Purbalingga	1 paket	30,000,000	30,000,000
24	SDN 1 Purbalingga Wetan	Purbalingga	1 paket	30,000,000	30,000,000
25	SDN 3 Purbalingga Lor	Purbalingga	1 paket	30,000,000	30,000,000
26	SDN 1 Makam	Rembang	1 paket	30,000,000	30,000,000
JUMLAH			26 Paket		780,000,000

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI